



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi  
Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir  
(Studi Kasus Kota Yogyakarta)**

Skripsi

Oleh

Cut Avira Hidayat

6071801130

Bandung

2022



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

*Terakreditasi A*

*SK BAN-PT NO. 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi  
Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir  
(Studi Kasus Kota Yogyakarta)**

Skripsi

Oleh

Cut Avira Hidayat

6071801130

Pembimbing

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Bandung

2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Publik  
Program Studi Administrasi Publik Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Cut Avira Hidayat  
Nomor Pokok : 6071801130  
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi Kasus Kota Yogyakarta)

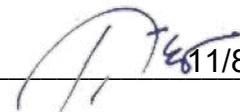
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 06 Juli 2022  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Penguji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si. :  11/8/22

**Sekretaris**

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si. :  11/8/22

**Anggota**

Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si. :  11/8/22

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Cut Avira Hidayat

NPM : 6071801130

Jurusan / Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan  
Retribusi Parkir (Studi Kasus Kota Yogyakarta)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2022



Cut Avira Hidayat

## ABSTRAK

Nama : Cut Avira Hidayat  
NPM : 6071801130  
Judul : Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi  
Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi  
Kasus Kota Yogyakarta)

---

Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi Retribusi Daerah yang dimana berpotensi tinggi untuk menaikkan dalam kas daerah Kota Yogyakarta. Maka dari itu diadakan penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir dalam hal perpajakan di Kota Yogyakarta dan kemudian di Kota Yogyakarta realisasi dalam Retribusi Parkir ini mencapai pada target realisasi penerimaan retribusi parkir. Dalam penyelenggaraan kebijakan retribusi parkir di Kota Yogyakarta, masih terjadi adanya permasalahan seperti adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal perpajakan seperti juru parkir tidak bertanggung jawab dan adanya pelanggaran tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana proses dari implementasi kebijakan penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam (6) variabel yaitu (1) standar atau ukuran dan tujuan kebijakan, (2) sumber daya – sumber daya kebijakan, (3) komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan, (4) karakteristik atau ciri dari badan pelaksana, (5) kondisi sosial, politik dan ekonomi, (6) sikap para pelaksana. Teori ini menilai keberhasilan atau kegagalan dari sebuah implementasi dalam menilai kinerja kebijakan yang berdasarkan variabel tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir di Kota Yogyakarta berhasil dan berjalan dengan baik. Kinerja implementasi kebijakan ini dikatakan baik disimpulkan berdasarkan sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan ini, mempunyai standar atau tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan, bentuk komunikasi yang dilakukan oleh pihak Dinas perhubungan juga berlangsung dengan baik, karakteristik yang dimiliki badan pelaksana juga sudah baik, kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik cukup baik dalam pelaksanaan kebijakan, dan terakhir sikap para pelaksana dalam kebijakan ini juga baik untuk menerapkan kebijakan.

**Kata Kunci** : Retribusi Parkir, Implementasi Kebijakan Publik, Kota Yogyakarta

## ABSTRACT

Name : Cut Avira Hidayat  
Student ID : 6071801130  
Titlee : *Analysis of the Implementation of Parking Retribution Policy  
Implementation in Achieving the Parking Retribution Revenue  
Target (Case Study of Yogyakarta City)*

---

Parking levies in the city of Yogyakarta are one of the important sources of income for regional levies which have high potential to increase the regional treasury of the city of Yogyakarta. Therefore, the implementation of a parking levy policy in terms of parking in the city of Yogyakarta and then in the city of Yogyakarta the realization of this parking levy reached the target of realizing the parking levy receipt. In implementing the parking retribution policy in the city of Yogyakarta, there are still problems such as the presence of irresponsible persons in terms of parking such as irresponsible parking attendants and violations of parking rates that are not in accordance with regulations. The purpose of this study is to see how the process of implementing the parking levy policy implementation in achieving the target of parking retribution receipts in the city of Yogyakarta

This research is a descriptive qualitative research. The theory used in this research is the Van Meter and Van Horn Public Policy Implementation Theory which has six (6) variables, namely (1) standards or policy measures and objectives, (2) policy resources, (3) communication between organizations. related and implementation activities, (4) the characteristics or characteristics of the implementing agency, (5) social, political and economic conditions, (6) the attitude of the implementers. This theory assesses the success or failure of an implementation in assessing policy performance based on these variables.

The results of this study indicate that the performance of the parking retribution policy in the city of Yogyakarta is successful and running well. The performance of the implementation of this policy is said to be good, concluded based on having achieved the objectives to be achieved in this policy, having standards or benchmarks in implementing the policy, the form of communication carried out by the Department of Transportation is also going well, the characteristics of the implementing agency are also good, the condition of the implementation of the policy is good. the social, economic and political environment is quite good in implementing the policy, and finally the attitude of the implementers in this policy is also good in implementing the policy.

**Keywords :** Parking Retribution, Public Policy Implementation, Yogyakarta City

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT serta karunia-Nya dan berkat-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi Kasus Kota Yogyakarta)**”.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan dalam memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata I Administrasi Publik dalam Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dilalui oleh penulis, namun berkat dukungan, doa, bimbingan, bantuan, nasihat dan saran dari berbagai pihak, maka segala hambatan dan kesulitan yang dilalui tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik.

Maka dari itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang selalu ada untuk mengasihi dan memberikan kekuatan serta kemampuan kepada penulis untuk mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kemudian, penulis juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Bapak Pius Sugeng Prasetyo, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan nasihat mengenai skripsi dari awal sampai akhir dari penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA selaku Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan yang dengan tulus memberikan dan membagikan pembelajaran baik itu materi dan moral kepada saya.
5. Almarhum Papa Ir.H Taufiq Hidayat, M.M dan Mama Mariani yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang dan dukungan penuh baik dari moral dan materil yang tidak pernah berhenti untuk saya. Tanpa adanya mereka, saya tidak akan bisa mencapai pada titik ini untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Oscar Dani, Guntur Wicaksana, Cut Avivah dan Cut Avinda selaku saudara kandung saya yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan saya untuk menyelesaikan dalam penulisan skripsi ini.
7. Mbulrus, Mbulndut, Akai, Ntah, Dora, Mbel dan Unicorn selalu setia menemani dan menghibur saya dalam waktu 24 jam setiap harinya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Ecclesia Renchart M, Rufia Jasmine, Gita Sifani, dan Mezara Kiani yang selalu bersama berproses dalam perkuliahan, setia untuk menemani saya, yang sudah menemani untuk mendengarkan segala keluh kesah cerita kehidupan, bercanda tawa disaat skripsian bersama pada setiap harinya, dan saling menyemangati satu sama lain.
9. Teman – teman yang menjadi bagian dari IBLIS BDG yaitu Katya Putri, Niqa Nitya, Elizabeth Sihotang, Khansa Erika, Xena Wanggai, Jacqueline Manuella, dan Putri Meyliasna yang menjadi kenangan dan pengalaman selalu ada untuk bermain dan menyemangati dalam proses perkuliahan dari mahasiswa baru sampai sekarang sudah di akhir proses perkuliahan.
10. Teman – teman seperbimbingan yaitu Steven Opet, Seltiel, Kak Gilbert Kelvin, Kak Matthew, Kak Rajendra dan Kak Naufal yang selalu menanyakan progress dan selalu menyemangati untuk menyelesaikan bersama dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman – teman basket dari Secret Society yang juga menemani waktu luang saya untuk bermain basket bersama disaat suntuk menulis skripsi.

12. Bapak Imanudin Aziz selaku Kepala Bidang Perpakiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dan segenap staff Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta selaku partisipan dalam skripsi ini atas kerja sama, bantuan dan izin yang diberikan untuk melengkapi data untuk penyusunan penulisan skripsi ini.
13. Teman – teman di Pontianak yaitu Stella Ghassani, Heni Diana, Talitha Zafirah, Dhilla Saffanah dan segenap teman – teman di Bermuda Coffee yang selalu tidak pernah berhenti memberikan semangat dan cerita tawa di setiap harinya untuk saya dalam memproses penulisan skripsi ini.
14. My special friend that I can't mentioned his name, yang selalu mendoakan saya dalam perjalanan hidup saya, menyemangati saya disaat saya merasa down, saat saya merasa suntuk selalu diberikan canda tawa yang membuat saya semangat kembali.
15. Rekan – rekan Administrasi Publik Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan, cerita perkuliahan dan kerja sama selama 4 tahun perkuliahan.
16. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing off this hard work, I wanna thank me for having no day off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always been a giver and I trying to give more when I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all the time.*

Akhir kata, penulis panjatkan doa kepada Allah SWT semoga segala bentuk amal kebaikan semua pihak yang sudah terlibat untuk membantu selama proses penulisan skripsi ini diberikan balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dan akan pastinya sangat bermanfaat bagi penulis.

Bandung, 07 Juni 2022

Cut Avira Hidayat

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.5 Ruang Lingkup Penelitian .....	11
BAB II.....	12
2.1 Pendapatan Asli Daerah .....	12
2.2 Retribusi Daerah.....	14
2.2.1 Jenis Retribusi Daerah .....	16
2.2.2 Pemungutan Retribusi Daerah.....	17
2.3 Retribusi Parkir.....	18
2.4 Kebijakan Publik .....	19
2.5 Implementasi Kebijakan Publik .....	22
2.5.1 Model Implementasi Kebijakan Publik.....	25

2.6 Kerangka Pemikiran .....	33
2.7 Penelitian Terlebih Dahulu.....	35
<b>BAB III .....</b>	<b>38</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Sumber Data .....	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.5 Teknik Analisis Data .....	42
<b>BAB IV .....</b>	<b>44</b>
4.1 Profil Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.....	44
4.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	46
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	47
4.4 Retribusi Parkir di Kota Yogyakarta .....	48
4.4.1 Tarif Retribusi Parkir Kota Yogyakarta.....	49
4.4.2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir Kota Yogyakarta .....	51
4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Rertribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2016 – 2021 .....	56
<b>BAB V.....</b>	<b>57</b>
5.1 Deskripsi Data Penelitian .....	57
5.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	59
5.3 Deskripsi dan Pembahasan Hasil Penelitian .....	60
5.3.1 Standar atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan .....	61
5.3.2 Sumber daya – Sumber daya Kebijakan .....	67
5.3.3 Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan .....	74

5.3.4 Karakteristik atau ciri dari badan / instansi pelaksana .....	81
5.3.5 Kondisi sosial, politik dan ekonomi.....	84
5.3.6 Sikap para pelaksana .....	90
<b>BAB VI .....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	35
Tabel 4. 2 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....	52
Tabel 4. 3 Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....	54
Tabel 5. 1 Daftar Informan.....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn .....	28
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah .....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Tahun 2021 .....	48
Gambar 5. 1 Juru Parkir sedang berkonsultasi kepada Dinas Perhubungan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	80
Gambar 5. 2 Juru Parkir sedang berkonsultasi ke kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta .....	80

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta Tahun 2016 - 2021 .....	56
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti dari Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan bahwa dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar tahun 1945, Pemerintah Daerah melaksanakan sendiri dalam urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diberitahukan bahwa Otonomi Daerah merupakan hak dan kewajiban dari Daerah otonom untuk bisa melaksanakan sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan setempat sesuai dengan peraturan dalam perundangan.

Dalam penyerahan otonomi daerah terdapat tujuan agar Pemerintah Kota atau Kabupaten dapat optimal secara mandiri. Kemandirian daerah akan terlaksanakan dengan baik apabila implementasi dari otonomi daerah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari rakyat daerah setempat. Dalam reformasi terdapat satu tuntutan yaitu Otonomi Daerah dalam menciptakan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang sangat erat dengan desentralisasi. Setiap Daerah diberikan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka desentralisasi. Desentralisasi merupakan menyerahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, mulai

dari hal kebijakan, perencanaan hingga pada pelaksanaan dan pembiayaan dalam rangka demokrasi<sup>1</sup>.

Dalam melakukan desentralisasi, dalam menyerahkan kekuasaan mesti ada penyerahan dan pengalihan biaya. Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dibutuhkan dalam kekuasaan dan kemampuan untuk menggali sumber – sumber dalam keuangan daerah itu sendiri. Sumber – sumber dari pemasukan Daerah tersebut akan digunakan untuk mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber pembiayaan dalam keuangan itu sendiri yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam hal sumber pembiayaan untuk otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus bisa mengelola sumber penerimaan Daerah secara optimal dan efektif, sehingga nantinya akan Daerah akan mempunyai persediaan penerimaan untuk keuangan Daerah yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dan kegiatan dalam pembangunan Daerah.

Berdasarkan dari sumber pendapatan untuk Pendapatan Asli Daerah, salah satu yang memiliki potensi yang besar adalah retribusi daerah, yang dimana berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 bagian yaitu<sup>2</sup> :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu biaya atas jasa yang pemerintah daerah sediakan untuk mencapai tujuan dalam kepentingan umum dan manfaat umum hingga bisa dinikmati oleh personal atau badan.

---

<sup>1</sup> Tangkilisan Hessel Nogi S., *Manajemen Publik* (Jakarta: Grasindo, 2007), hlm. 1.

<sup>2</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Mengenal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/>, pada tanggal 23 Desember 2021.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dalam menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimaangatkan dan pelayanan oleh pemerintahan daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta.
3. Retribusi Perijinan Tertentu, yaitu pungutan terhadap jasa dalam pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Daerah menjadi salah satu sumber dari PAD yang mempunyai peluang besar untuk dikembangkan dan ditingkatkan lebih efektif hingga dapat memberikan dampak yang besar juga kepada PAD terutama pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai otonomi yang luas yang kemudian dapat meningkatkan kualitas dari pelayanan daerah itu sendiri<sup>3</sup>. Selain itu juga retribusi daerah merupakan sumber pendapatan yang paling memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan inovasi – inovasi yang dilakukan dan dirancang oleh Pemerintah Daerah dan dalam mengoptimalkan pengimplementasian pemungutan Retribusi Daerah dengan konsisten akan dapat memberikan kontribusi yang besar nantinya pada kas daerah.

---

<sup>3</sup> Tri Nugroho, Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Retribusi Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*” (Yogyakarta: UII, 2017), Hal 16.

Dari Retribusi Daerah yang berpacu pada kebijakan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu dari retribusi daerah yang dapat meningkatkan penerimaan kas daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan golongan retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha. Melihat bahwa pentingnya retribusi penting bagi Kota/Kabupaten maka pelaksanaan dalam pemungutan retribusi parkir yang dikelola oleh suatu Pemerintah Daerah harus berorientasi dengan baik secara maksimal dan efektif dalam meningkatkan produktivitas dan profesionalitas untuk mencapai suatu target yang akan dicapai yang gunanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan membantu menjamin keberlangsungan dari Pemerintahan Daerah. Parkir adalah aktivitas yang umum dan dimana pastinya masyarakat juga mengetahui tentang parkir. Kemudian memasuki dunia perpajakan, Indonesia tersendiri mempunyai cara yang berbeda dengan Negara – Negara lainnya dan memiliki ciri khas tersendiri<sup>4</sup>. Untuk menyempurnakan dalam pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masing – masing dari Pemerintah Daerah menuangkannya kembali kedalam Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Kota Yogyakarta merupakan sebagai salah satu destinasi kota untuk berwisata memberikan peluang dan kesempatan untuk mengembangkan inovasi – inovasi dalam meningkatkan pendapatan retribusi parkir setiap tahunnya melalui penerimaan retribusi parkir yang meliputi Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir

---

<sup>4</sup> Fitria Ningsih, Skripsi: “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Mataram Tahun 2020” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), Hal 19.

(TKP) dan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum (TJU). Dalam mengatur penyelenggaraan perparkiran yang terdapat Yogyakarta ini, maka dari itu Pemerintah Kota Yogyakarta menyusun dan memberlakukan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran. Didalam Perda tersebut, dijelaskan pada pasal 4 bahwa *scoop* dari penyelenggaraan perparkiran meliputi pelaksanaan parkir pada : a) fasilitas parkir yang berada didalam ruang milik jalan; dan b) fasilitas parkir di luar ruang milik jalan. Pengelolaan fasilitas parkir tersebut tentunya dikelola oleh pemerintahan daerah, yang dimana pemungutan atau penerimaan dari fasilitas parkir tersebut disebut retribusi parkir.

Untuk membahas retribusi parkir yang sebagaimana di maksud, pemerintah daerah Kota Yogyakarta selain mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta juga secara spesifik menyusun dan dalam pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. Kemudian untuk petunjuk dari pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2020. Mengingat bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota wisata maka objek retribusi parkir ini mendapat perhatian yang besar dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk memberikan kontribusi yang besar untuk penerimaan kas daerah.

Penyelenggaraan dalam perparkiran di Kota Yogyakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perparkiran yang memberikan kewenangan penyelenggaraan parkir kepada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan keterlibatan badan atau pengelola fasilitas parkir, juru parkir, pengguna fasilitas parkir. Secara spesifik, untuk penyelenggaraan pengelolaan parkir dan retribusi parkir sendiri di tangani oleh Bidang Pengelolaan Perparkiran yang terdiri dari seksi optimalisasi perparkiran dan seksi retribusi parkir.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran terdapat harapan bahwa retribusi parkir dapat memberikan sumbangsih dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah kota Yogyakarta. Dalam melakukan berbagai usaha yang direncanakan tidak selalu selamanya akan berjalan dengan mulus tanpa adanya hambatan. Dalam penanganan retribusi parkir sendiri dijelaskan oleh Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta banyak terjadi permasalahan terhadap parkir di Kota Yogyakarta yaitu parkir liar, pelanggaran tarif parkir (maraknya juru parkir yang menarik retribusi tidak sesuai aturan), parkir tidak sesuai dengan peruntukan, pelanggaran parkir (parkir di area larangan parkir atau trotoar), pelanggaran parkir swasta yang tidak mempunyai izin.

Kepala Bidang Perparkiran, Imanudin Aziz mengatakan bahwa dari permasalahan yang terjadi dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan ditangani berupa solusi yaitu pembinaan dan pengawasan serta penindakan

tegas dalam pelanggaran<sup>5</sup>. Ia juga menegaskan bahwa Dishub sendiri berkerja keras untuk menangani pengelolaan retribusi parkir, untuk menahankan realisasi penerimaan yang mereka dapatkan selama ini. Maka dari itu perlu adanya kerja sama dari pemerintah, masyarakat, dan juru parkir untuk melaksanakan pengelolaan parkir dengan efektif dan efisien agar mendapatkan penerimaan retribusi parkir yang secara optimal dan menyumbang kas daerah. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sendiri juga masih mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat dikatakan belum optimal<sup>6</sup>. Terlebih lagi juga Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta juga harus melaksanakan tugas utama yaitu mengatur lalu lintas.

Kemudian di lapangan juga ada ditemukan adanya hambatan yang terjadi dilapangan maka hal tersebut bisa di katakan merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat yang terjadi di lapangan dan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta ini merupakan hal – hal yang menyimpang dalam pelaksanaan, seperti halnya juru parkir yang ilegal dan terjadi pelanggaran aturan tarif retribusi parkir. Faktor pendorong dari pelaksanaan kebijakan ini adalah seperti tercapainya target dari penerimaan retribusi parkir.

Dalam tahap pengimplementasian, terdapat banyak indikator yang mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan sebuah kinerja dari implementasi kebijakan yang telah disusun. Dalam model teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang digunakan dalam individu maupun kelompok –

---

<sup>5</sup> Observasi melalui data pengelolaan penyelenggaraan perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021.

<sup>6</sup> *Ibid.*

kelompok pejabat pemerintah atau swasta yang diarahkan agar dapat mencapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan<sup>7</sup>. Van Meter dan Van Horn ini mengemukakan suatu model yang pada dasarnya mencakup 6 (enam) variabel yang membentuk keterkaitan antara kebijakan dengan kinerja kebijakan. Variabel tersebut selain berkaitan dengan kinerja kebijakan juga saling berkaitan antar satu variabel dengan lainnya. Variabel yang dimaksud adalah antara lain 1) standar dan tujuan, 2) sumber daya, 3) karakteristik organisasi pelaksana, 4) komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan, 5) sikap para pelaksana dan 6) kondisi – kondisi ekonomi, sosial dan politik<sup>8</sup>.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Yogyakarta ini perlu dilakukan untuk mengetahui bahwa apakah implementasi kebijakan ini sudah berhasil apa tidak, apakah sudah mencapai dalam realisasi pendapatan target penerimaan dan apakah implementasi kebijakan ini mengurangi permasalahan yang terjadi pada lapangan walaupun dalam realisasi penerimaan retribusi parkir sudah mencapai dalam targetnya. Karena sejauh ini belum terdapat hasil analisis penelitian yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan retribusi parkir di Kota Yogyakarta ini berhasil dilakukan dalam mengatasi permasalahan yang ada dan mencapai tujuan untuk mencapai target penerimaan retribusi parkir.

Keberhasilan dari sebuah tidak dapat ditentukan hanya dengan salah satu faktor bahwa realisasi dari penerimaan parkir saja tetapi banyak faktor yang menunjang dalam keberhasilan sebuah implementasi. Kemudian juga dilihat dari

---

<sup>7</sup> Nuryanti Mustari, *Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Membumi Publishing, 2013), hal. 131

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 132.

permasalahan yang dijelaskan dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta apabila masalah tersebut dapat diatasi maka realisasi dari penerimaan retribusi parkir akan jauh lebih besar dari targetnya.

Mengingat bahwa kontribusi dari retribusi parkir yang bagian dari retribusi daerah merupakan salah satu sumber dari retribusi daerah yang berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, dengan melihat dari beberapa permasalahan yang masih banyak terjadi dan ditemukan dalam hal perparkiran di Kota Yogyakarta, maka ini menjadi alasan peneliti untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan parkir dengan melihat proses implementasi kebijakannya, sumbangsih retribusi parkir terhadap retribusi daerah, apakah retribusi parkir efektif dan efisien dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir dengan menyusun judul penelitian Analisis Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam Mencapai Target Penerimaan Retribusi Parkir (Studi Kasus Kota Yogyakarta).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan Retribusi Parkir dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dari implementasi kebijakan penyelenggaraan Retribusi Parkir

dalam mencapai target penerimaan retribusi parkir di Kota Yogyakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan ilmu pengetahuan dalam pengembangan studi ilmu implementasi kebijakan publik dalam konteks kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir dalam upaya menncapai target penerimaan retribusi parkir dan diharapkan menjadi referensi dalam penelitian lebih lanjut yang khususnya mengenai kebijakan penyelenggaraan retribusi parkir.
2. Secara operasional, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk terus meningkatkan kebijakannya dapat memaksimalkan lebih baik lagi, dan dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak khususnya pemerintah daerah dalam menerapkan penyelenggaraan retribusi parkir dapat memicu inovasi – inovasi yang baru terhadap kebijakan tersebut.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian dan hasil yang diharapkan sesuai dengan outline, maka ruang lingkup yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data penelitian yang digunakan adalah data target dan realisasi pendapatan Retribusi Parkir Kota Yogyakarta dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.
2. Penelitian ini memiliki variabel bebas yang merupakan dimensi dari Teori Model Implementasi Kebijakan Publik :
  - Standar dan tujuan (standards and objectives)
  - Sumber daya (resources)
  - Karakteristik organisasi pelaksana (characteristics of the implementing agencies)
  - Komunikasi antar organisasi dan aktivitas penguatan (interorganizational communication and enforcement activities)
  - Sikap para pelaksana (disposition of implementors).
  - Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik (economic, sosial and political conditions)